

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perkembangan ekonomi dan teknologi di era globalisasi dapat menyebabkan beberapa pihak melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Kasus kecurangan ini tidak hanya terjadi karena adanya kerja sama antara auditor dan auditee, namun sering juga terjadi akibat seorang auditor gagal mendeteksi kecurangan. Kecurangan (*fraud*) adalah salah satu jenis penipuan yang sangat umum dan sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya terjadi oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dalam organisasi (Linda Handayani & Yuniati, 2022).

Auditor ditugaskan untuk menyelidiki kecurangan. Dalam praktiknya, auditor bertanggung jawab untuk menemukan dan menyampaikan bukti kecurangan (*fraud*) dan kemudian membuat kesimpulan tentang adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan berbeda dalam peristilahannya. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah apakah tindakan tersebut dilakukan dengan niat atau tidak sengaja. Kecurangan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan secara sengaja dan sadar, dibandingkan dengan kekeliruan, yang terjadi tanpa adanya kekeliruan. Auditor harus jeli dan memiliki kemampuan untuk mengungkap kecurangan atau kekeliruan (Rizqi et al., 2022).

Kasus-kasus yang melibatkan auditor, termasuk auditor pemerintah, membuat auditor menjadi sorotan publik. Auditor harus memahami dan memahami kecurangan, jenisnya, dan cara mendeteksinya agar auditor dapat melakukan audit dengan benar. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar laporan keuangan yang diaudit tidak mengandung kekeliruan atau kecurangan, sehingga auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang baik (Pangesti, 2018).

Dalam kasus kecurangan yang terjadi, seringkali terjadi dengan skema seperti menghilangkan dokumen, *mark-up* laba, hingga pencatatan laporan keuangan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada ekonomi negara. Adanya peluang untuk berperilaku buruk demi kepentingan kelompok dan individu pasti menjadi penyebab kecurangan tersebut (Rizqi et al., 2022).

Tabel 1.1 Kasus Kecurangan Yang Terjadi Di Beberapa Negara Maju

No.	Nama Perusahaan	Nama Kantor Akuntan Publik (KAP)	Modus Kecurangan Akuntansi
1.	British Telecom (2017)	PriceWaterhouse Coopers (PWC)	Memperpanjang kontrak palsu, faktur palsu, dan transaksi palsu dengan vendor untuk membesarkan penghasilan perusahaan.

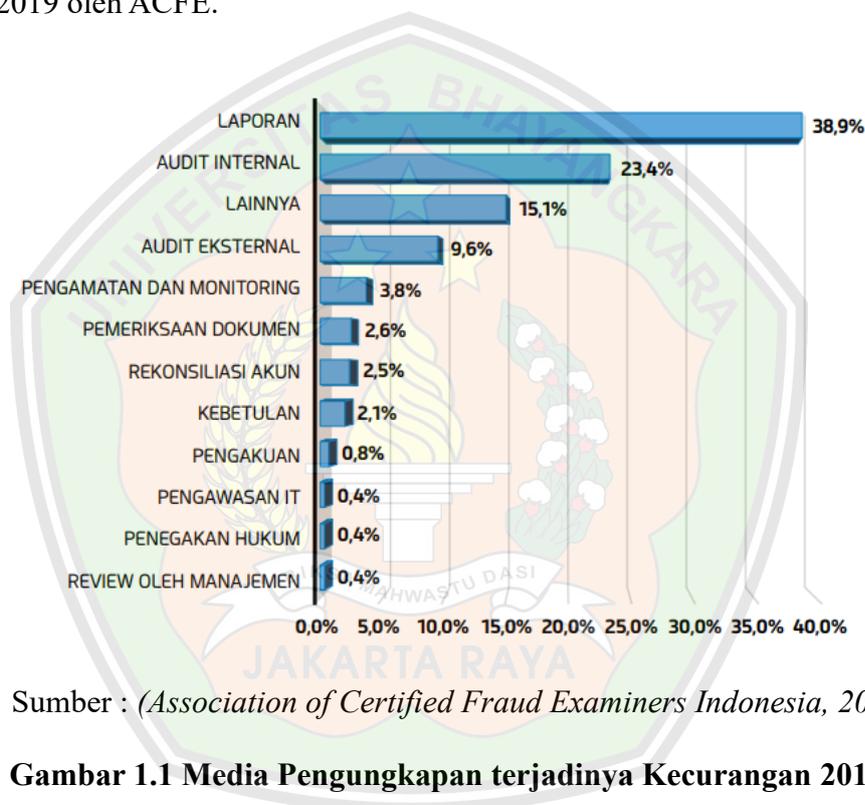
2.	Miller Energy Resources, Inc (2011)	KPMG	Meningkatkan nilai aset sebesar 100 kali lipat dari nilai sebenarnya di laporan keuangan.
3.	SNP Finance (2018)	Deloitte	Memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik.
4.	PT Hanson International TBK (2016)	Ernst & Young (E&Y)	Melakukan manipulasi dalam laporan keuangan arus kas dengan menggunakan dua teknik cash flow shenanigan.

Di Indonesia kecurangan tidak terjadi hanya di perusahaan, tetapi juga menambah ke instansi pemerintah. Namun, rakyat mempercayai pemerintah dengan menggunakan sumber daya negara, seperti pajak, untuk menjalankan pemerintahannya. Pemerintah harus menjalankan pemerintahan yang bersih, namun hal ini belum terlaksana karena kasus kecurangan telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Kecurangan di pemerintahan Indonesia berlangsung dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan tidak hanya dimulai oleh orang-orang di jabatan kelas atas tetapi juga mengakar hingga orang-orang di jabatan terbawah. Menurut survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019 bentuk kecurangan yang terjadi adalah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara & perusahaan, kecurangan laporan keuangan. Menurut (Kuntadi et al., 2022) kecurangan adalah tindakan yang

dimaksudkan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi orang lain dengan tujuan agar orang lain menderita kerugian dan pelaku memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gambar 1.1 berikut merupakan data statistik hasil survei media laporan yang paling banyak berkontribusi terungkapnya kecurangan di Indonesia pada tahun 2019 oleh ACFE.



Sumber : (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019*)

Gambar 1.1 Media Pengungkapan terjadinya Kecurangan 2019

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE di tahun 2019 memperlihatkan bahwa auditor internal berada di peringkat kedua dari dua belas pihak yang mendeteksi kecurangan dengan persentase 23,4%. Mengingat survei pada tahun 2016 auditor internal berada di peringkat 3 dengan persentase 13,5%.

Menurut data yang telah dikumpulkan oleh Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) Indonesia memperoleh skor 34/100 di peringkat 110

dari 180 negara pada tahun 2022. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah yang pernah diterima Indonesia sejak tahun 2015 (Transparency International, 2022).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014) BPKP merupakan salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah presiden. Menurut Perpres tersebut, BPKP bertanggung jawab untuk mendukung kemajuan nasional dan melaksanakan fungsi pengawasan keuangan dari tingkat pusat hingga daerah (Rizqi et al., 2022)

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dan merugikan negara, pemerintah harus berusaha meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (*clean government*). Meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan membangun sistem pengawasan yang efektif adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini. Pemerintahan Indonesia yang masih rentan terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) APIP memiliki potensi untuk mendorong pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik, mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta meningkatkan nilai dalam segala aspek melalui saran, rekomendasi, dan layanan konsultasi (Pangesti, 2018).

Di Indonesia terdapat kasus korupsi proyek BTS 4G terjadi pada awal triwulan kedua tahun 2023. Kasus tersebut diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Akibat dari kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian

negara yang tidak sedikit, BPKP menyatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 8,32 Triliun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP (Sumber: bpkp.go.id)

Fenomena kecurangan juga terjadi dalam skala daerah tepatnya di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terjadi kasus penyimpangan dana yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banjar. Tim audit investigatif BPKP Kalimantan Selatan mengungkapkan laporan sementara, diduga telah ditemukan penyimpangan keuangan oleh oknum anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas di tahun 2020-2021. Diketahui anggaran perjalanan dinas DPRD Banjar mencapai Rp 38 M, sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dan pada tahun 2021 sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Kasus ini berlanjut hingga tahun 2023, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan tersangka. Namun pada bulan Agustus tahun 2023 kepala Kejari Banjar menyatakan bahwa kasus ini dihentikan ketika masih tahap penyelidikan, jadi belum sempat ada tersangka, tetapi jika ada fakta terbaru kasus bisa dibuka kembali, bahkan bisa naik ke penyelidikan. Jika ditotal negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah, namun karena kejaksaan menghitungnya per individu yaitu mengakibatkan kerugian hanya Rp 500 Ribu

sampai Rp 4 jutaan. Seluruh anggota DPRD yang terlibat dalam Perjalanan Dinas diketahui sudah mengembalikan kerugian tersebut, oleh karena itu kasus tersebut dihentikan (Sumber: koranbanjar.com)

Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus memiliki perspektif skeptisisme profesional. Jika auditor tidak memiliki perspektif ini, auditor tidak akan mampu akan mampu mendeteksi kecurangan karena auditor hanya akan percaya pada keyakinan manajemen tanpa memiliki bukti yang mendukung keyakinan tersebut (Rafnes & Primasari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Arwinda Sari et al., 2018) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rafnes & Primasari, 2020) yang menyatakan bahwa skeptisisme tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Auditor internal yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama diharapkan dapat membantu mencegah dan menemukan kecurangan di dalam perusahaan. Pengalaman kerja ini juga penting untuk memecahkan kasus di perusahaan yang diperiksanya (Harahap & Tobing, 2020). Pengalaman juga dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam melakukan mendeteksi kecurangan. Auditor dapat meningkatkan pengalaman dengan memperbanyak pengetahuan (Rafnes & Primasari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawaty & Betri, 2019) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan

keuangan. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herfransis & Rani, 2020) bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Seorang auditor yang independen cenderung menilai kliennya secara objektif tanpa tekanan dan bergantung pada orang lain, sehingga dapat menggunakan kemampuannya untuk menemukan kecurangan dalam perusahaan dengan lebih baik (Herfransis & Rani, 2020). Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, oleh karena itu ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Harahap & Tobing, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian (Salsabil, 2020) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sampel yang diambil oleh penulis merupakan internal auditor yang berada pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta. BPKP adalah lembaga pengawasan intern pemerintah dan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan internal di pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas masih ditemukan adanya tindakan kecurangan yang kerap terjadi di instansi pemerintahan dan perusahaan dan terdapat *research gap*, maka dari itu peneliti ingin mengkaji dan menganalisa kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, dan Pengalaman kerja Terhadap Pendeteksian Kecurangan**

(Fraud) (Studi Empiris Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
2. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Pendeteksian kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh faktor skeptisme profesional, pengalaman kerja, dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya bidang auditing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang auditor internal pemerintah serta bagaimana pengaruh skeptisme profesional, independensi, dan pengalaman kerja terhadap pendeteksian kecurangan.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang pendeteksian kecurangan.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh skeptisme profesional, independensi, dan pengalaman kerja terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada auditor yang bekerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta saja.

3. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner online melalui *google form* yang mengakibatkan tingkat pengembalian kuesioner yang rendah.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mudah dibaca, penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, meliputi penjelasan latar belakang masalah yaitu banyaknya kecurangan yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi proyek BTS 4G yang terjadi pada awal triwulan kedua tahun 2023. Kasus tersebut diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Akibat dari kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, BPKP menyatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 8,32 Triliun. Memberikan penjelasan rumusan masalah yaitu pengaruh skeptisme profesional, pengalaman kerja, dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan

praktis, dan batasan masalah berisikan tentang lokasi pengambilan sampel dan mengenai cara penyebaran kuesioner.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi landasan penelitian yaitu teori atribusi, teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian seperti skeptisme profesional, pengalaman kerja, independensi dan kecurangan. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis, dan hubungan antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang terdiri dari desain penelitian yaitu penelitian bersifat kuantitatif dengan sumber data primer, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, serta pengolahan dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.

